

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya tentu tidak hanya berusaha untuk mendapatkan keuntungan secara *financial*, akan tetapi keuntungan sosial juga menjadi sasaran yang akan menguatkan keuntungan *financial* tersebut. Keuntungan sosial diperlukan oleh perusahaan berupa kepercayaan dari masyarakat terhadap perusahaan dan di masa yang akan datang dapat mencegah konflik sosial antara perusahaan dengan masyarakat. Perkembangan *Corporate Social Responsibility* terkait dengan semakin parahnya kerusakan lingkungan yang terjadi di Indonesia mulai dari penggundulan hutan, polusi udara dan air hingga perubahan iklim.

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah suatu bentuk tanggung jawab perusahaan memberikan kontribusi jangka panjang terhadap lingkungan di masyarakat untuk dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik lagi. Tanggung jawab perusahaan merupakan sebuah tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh setiap perusahaan yang bertujuan untuk menciptakan kemandirian publik. Dasar hukum CSR tertuang dalam UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseoran terbatas (PT) pasal 74 UU RI Ayat 1 mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, yaitu “*perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung*

jawab social dan lingkungan". Perusahaan yang secara konsisten menjalankan program CSR akan memberikan dampak positif terhadap kondisi sosial dan lingkungan perusahaan yang nantinya memperoleh penilaian yang baik dimata publik dan tentunya akan mempengaruhi keberlangsungan usaha di masa depan.

Perusahaan juga dapat membangun reputasinya, seperti meningkatkan citra perusahaan maupun pemegang sahamnya, posisi merek perusahaan, maupun bidang usaha perusahaan. Melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR), kesejahteraan dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat lokal maupun masyarakat luas akan terjamin. Pada kondisi seperti ini akan menjamin kelancaran seluruh proses atau aktivitas produksi perusahaan serta pemasaran hasil-hasil produksi perusahaan. Dalam hal ini perlu ditegaskan bahwa CSR berbeda dengan *charity* atau sumbangan sosial. CSR dijalankan di atas suatu program dengan memperhatikan kebutuhan dan keberlanjutan dalam jangka panjang, sedangkan sumbangan sosial lebih bersifat sesaat dan berdampak sementara.

Fenomena yang terjadi saat ini salah satunya dilakukan oleh PT Indo Tambangraya Megah Tbk yang melakukan pengelolaan serta pengolahan limbah yang dilakukan secara sendiri maupun melibatkan pihak ketiga. Pengelolaan limbah cair dilakukan melalui kolam pengendapan dan instalasi pengelolaan air limbah (IPAL). Air limpasan diolah dan dipantau secara berkala guna memenuhi baku mutu yang ditetapkan oleh pemerintah sebelum akhirnya dialirkan ke badan air. Sementara untuk mengelola limbah padat, ITM menerapkan prinsip 3R: *reduce* (mengurangi), *reuse* (memanfaatkan kembali), dan *recycle* (daur ulang). Melalui 3R ITM berusaha melakukan praktik-praktik yang bertanggung jawab

untuk selalu efisien dalam menjalankan kegiatan operasional agar limbah dapat diminimalkan, digunakan kembali, dan didaur ulang untuk keperluan lainnya. Berbagai jenis limbah yang dihasilkan dari aktivitas di tambang dan kantor ITM serta dari karyawan. Jenis-jenis limbah tersebut adalah limbah padat, limbah cair, limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), dan limbah domestik. Limbah padat misalnya, besi bekas dan logam, sisa ban berjalan, baterai, ban dan abu batubara. Sebagian besar limbah cair merupakan air limbah tambang, sedangkan limbah B3 cair bersumber dari minyak pelumas bekas. Sebagian limbah padat maupun cair dapat dikategorikan sebagai limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sesuai Peraturan Pemerintah No. 101 tahun 2014. Kebijakan ITM mengharuskan penggunaan kembali produk yang masih memiliki nilai ekonomis. Untuk abu batubara, yang dikategorikan sebagai limbah B3, PT Indominco Mandiri telah memperoleh izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk dimanfaatkan sebagai bahan konstruksi paving blok di area operasional ITM dan di komunitas sekitar. Selain itu, ITM memanfaatkan limbah pelumas bekas sebagai campuran bahan peledak ANFO. Pada tahun 2016, ITM berhasil mengurangi limbah padat sebesar 23,44% dan limbah cair sebesar 8,65%. Pada tahun 2017, ITM berhasil menurunkan intensitas limbah non B3 sebesar 24% (“Pengolahan Limbah,” n.d.)

Adapun, CSR yang dilakukan oleh PT Pertamina, yang mengajak masyarakat di sekitar kilang Pertamina Sei Pakning untuk mengalih fungsi lahan gambut bekas kebakaran menjadi pertanian nanas. Hal ini menurut dia, menyelesaikan masalah kebakaran lahan gambut yang sering melanda daerah

tersebut. Dengan adanya pertanian tersebut, tutur Karliansyah, juga dapat menambah perekonomian masyarakat sekitar.

Hal ini menurut dia, menyelesaikan masalah kebakaran lahan gambut yang sering melanda daerah tersebut. Dengan adanya pertanian tersebut, tutur Karliansyah, juga dapat menambah perekonomian masyarakat sekitar. Ini format yang bagus, masyarakat diajak. Tadi dengan menanam nanas 1 hektare itu hasilnya Rp 17 juta dan meningkat sekarang jadi 4,5 hektare. Ini luar biasa," tutur dia. Karliansyah menambahkan, adanya alih fungsi lahan gambut dapat membantu upaya pemerintah mengurangi kebakaran lahan gambut. Dia mengungkapkan, lahan gambut yang terbakar setiap tahun luasnya menurun.

Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, luasan kebakaran lahan gambut di Provinsi Riau setiap tahunnya menurun. Pada tahun 2015 luas lahan gambut yang terbakar mencapai 183.809 hektare. Namun pada tahun 2016, luasan kebakaran menurun menjadi 85.220 hektare, sedangkan pada tahun ini semakin menurun dengan luasan kebakaran mencapai 6.841 hektare.

Pemilihan perusahaan manufaktur sebagai objek penelitian karena jumlah perusahaan yang masuk kategori perusahaan manufaktur lebih banyak dibandingkan dengan perusahaan lainnya. Alasan lain memilih perusahaan manufaktur sebagai objek penelitian ini adalah karena saham perusahaan manufaktur lebih banyak diminati oleh investor daripada perusahaan lainnya. Perusahaan manufaktur tidak terikat pada peraturan pemerintah, serta perusahaan manufaktur merupakan salah satu aset yang memiliki peranan penting dalam pembangunan, terlebih lagi dalam menghadapi era persaingan bebas, perusahaan

manufaktur dituntut semakin efektif dalam mempublikasikan laporan keuangannya dimana pengguna laporan keuangan memiliki kepentingan dalam hal tersebut (Fauzi, 2017).

Konsep keagenan yaitu sebuah kontrak yang dimana *principal* menyewa *agent* untuk melakukan kontribusi bagi kepentingan mereka dengan memberikan beberapa wewenang pembuatan keputusan kepada agen. Sesuai dengan teori agensi maka perusahaan besar mempunyai biaya agensi yang besar yang disusul dengan menyatakan informasi lebih banyak pula. Banyaknya informasi yang dipegang oleh calon investor akan mengakibatkan semakin kecilnya tingkat ketidakmenentuan yang ditanggung calon investor itu sendiri mengenai masa depan perusahaan emiten (Jensen dan Meckling, 1976).

Dewan komisaris adalah bagian dari perusahaan yang bertugas mengawasi dan memberikan saran-saran kepada direksi dalam mengelola perusahaan. Ukuran dewan komisaris yang besar dalam suatu perusahaan akan meningkatkan pengawasan terhadap kinerja direksi dalam mengelola perusahaan, termasuk dalam praktik dan pengungkapan CSR (Nugroho dan Yulianto, 2015). Berdasarkan teori agensi, dewan komisaris merupakan mekanisme pengendali intern tertinggi yang bertanggung jawab untuk memonitor tindakan manajemen puncak. Individu yang bekerja sebagai anggota dewan komisaris merupakan hal penting dalam memonitor aktivitas manajemen secara efektif (Sembiring, 2005), sehingga dapat disimpulkan bahwa dewan komisaris dapat mempengaruhi luas pengungkapan CSR (Laksmi dan Purwanto, 2013). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap

pengungkapan CSR menurut peneliti (Laksmi dan Purwanto, 2013 & Pradnyani dan Sisdyani, 2015). Namun hasil penelitian ini bertolak belakang bahwa ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR menurut peneliti (Ramadhaningsih dan Utama, 2013 & Nugroho dan Yulianto, 2015).

Kepemilikan institusional merupakan saham dalam perusahaan yang dimiliki oleh investor institusional seperti pemerintah, lembaga keuangan, perusahaan asuransi dan institusional lainnya. Investor institusional lebih menekankan keuntungan jangka panjang perusahaan sehingga mereka sering memberi tekanan kepada manajemen untuk mengambil keputusan tidak hanya didasarkan pada keuntungan jangka pendek saja tetapi juga cara menaruh kepedulian dalam bidang-bidang sosial menurut peneliti (Nugroho dan Yulianto, 2015). Kepemilikan institusional yang besar dapat meningkatkan pengawasan kinerja manajemen, dalam hal ini terkait praktik dan pengungkapan CSR, sehingga dapat meyakinkan bahwa perusahaan tidak hanya beroperasi untuk keuntungannya sendiri namun juga memperhatikan para *stakeholder* lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar kepemilikan saham institusional maka semakin besar pengawasan yang bisa dilakukan oleh investor institusional dan hal tersebut akan menjadi dorongan bagi perusahaan untuk mengungkapkan CSR. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR menurut peneliti (Ramadhaningsih dan Utama, 2013 & Nugroho dan Yulianto, 2015). Namun bertolak belakang dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak

berpengaruh terhadap pengungkapan CSR menurut peneliti (Laksmitaningrum dan Purwanto, 2013 & Prana dan Suzan, 2016).

Tingkat *leverage* merupakan kemampuan perusahaan dalam menyelesaikan semua kewajibannya kepada pihak lain. Perusahaan yang mempunyai *leverage* tinggi mempunyai kewajiban yang lebih untuk memenuhi kebutuhan informasi krediturnya termasuk pengungkapan tanggung jawab sosial. *Leverage* memberikan gambaran mengenai struktur modal yang dimiliki perusahaan, sehingga dapat dilihat tingkat resiko tak tertagihnya suatu utang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi *leverage* kemungkinan besar perusahaan akan mengalami pelanggaran terhadap kontrak utang, maka manajer akan berusaha untuk melaporkan laba sekarang lebih tinggi dibandingkan laba dimasa depan (Lamia, Zirman, dan Anisma, 2014). Perusahaan yang memiliki rasio *leverage* tinggi akan lebih sedikit mengungkapkan CSR supaya dapat melaporkan laba sekarang yang lebih tinggi. Sesuai dengan teori agensi maka manajemen perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi akan mengurangi pengungkapan tanggung jawab sosial yang dibuatnya agar tidak menjadi sorotan dari para *debtholders*. Hasil penelitian menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR menurut (Arif dan Wawo 2016 & Giannarakis, 2014). Namun bertolak belakang dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR menurut (Laksmitaningrum dan Purwanto, 2013 & Santioso dan Chandra, 2012).

Size perusahaan merupakan variabel yang banyak digunakan untuk menjelaskan pengungkapan sosial yang dilakukan perusahaan dalam laporan

tahunan yang dibuat. Secara umum perusahaan besar akan mengungkapkan informasi lebih banyak daripada perusahaan kecil (Trisnawati, 2014). Hal ini karena perusahaan besar akan menghadapi resiko politis yang lebih besar dibanding perusahaan kecil. Secara teoritis perusahaan besar tidak akan lepas dari tekanan politis, yaitu tekanan untuk melakukan pertanggungjawaban sosial. Ketersediaan sumber daya dan dana membuat perusahaan merasa perlu membiayai penyediaan informasi untuk pertanggungjawaban sosialnya. Hal ini terkait dengan teori agensi, dimana perusahaan besar yang memiliki biaya keagenan yang lebih besar akan mengungkapkan informasi yang lebih luas untuk mengurangi biaya keagenan tersebut. Di samping itu perusahaan besar merupakan emiten yang banyak disoroti, pengungkapan yang lebih besar merupakan pengurangan biaya politis sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan (*size*) berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR menurut peneliti (Indraswari dan Astika, 2015 & Lamia et al., 2014). Namun bertolak belakang dengan penelitian yang menunjukkan bahwa bahwa ukuran perusahaan (*size*) tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR menurut (Laksmitaningrum dan Purwanto, 2013 & Pradnyani dan Sisdyani, 2015).

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“PENGARUH UKURAN DEWAN KOMISARIS, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, LEVERAGE DAN SIZE TERHADAP PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya terdapat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan CSR?
2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap pengungkapan CSR?
3. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap pengungkapan CSR?
4. Apakah *size* berpengaruh terhadap pengungkapan CSR?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini:

1. Untuk menguji pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap pengungkapan CSR.
2. Untuk menguji pengaruh kepemilikan institusional terhadap pengungkapan CSR.
3. Untuk menguji pengaruh *leverage* terhadap pengungkapan CSR.
4. Untuk menguji pengaruh *size* terhadap pengungkapan CSR.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan referensi mengenai pengaruh ukuran dewan komisaris, kepemilikan institusional, *leverage*, dan *size* terhadap pengungkapan CSR.

2. Manfaat praktis

Dengan adanya penelitian ini agar perusahaan dapat menjalankan program CSR dengan baik mengenai pengaruh ukuran dewan komisaris, kepemilikan institusional, *leverage* dan *size* terhadap pengungkapan CSR.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan digunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan berisi mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat serta sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan mengenai teori-teori yang melandasi penelitian ini dan menjadi dasar acuan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Selain itu menjelaskan tentang hasil penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan peneliti yang akan dilakukan, kerangka pikir, dan hipotesis penelitian

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab metode penelitian ini menjelaskan mengenai variabel penelitian, definisi operasional dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian, jenis dan sumber data, batasan

penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Dalam bab ini menjelaskan tentang gambaran subyek penelitian dan analisis data secara garis besar dari hasil penelitian analisis deskriptif, pengujian hipotesis, serta pembahasan

BAB V PENUTUP

Bab ini membahas kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran yang merupakan bagian akhir setelah analisis dilakukan

